

## BAB I

### LATAR BELAKANG MASALAH KASUS

Hasil dalam perkara perdata maupun di dalam perkara pidana, Hakim memerlukan pembuktian.

Pembuktian di dalam perkara pidana adalah usaha dari pihak jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa apa-apa yang didakwakannya di dalam surat dakwaan (*acte van verwijzing*) adalah benar. Sedangkan bagi Pembela atau Penasehat Hukum dan terdakwa, maka pembuktian adalah usaha dari pembela atau terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak benar, oleh karena itu mohon kepada hakim agar terdakwa dibebaskan (*vrijspreek*). Dua pandangan yang bertentangan itu tidaklah aneh, karena sudut pandangnya yang berbeda pula.

Sehubungan dengan ini P. Trapman menyatakan tentang sikap, pangkal tolak dan opini dari pihak-pihak tersebut sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Pandangan terdakwa di gambarkan sebagai pandangan subjektif dan posisi subjektif
2. Pandangan Penasehat Hukum terdakwa sebagai pandangan objektif dari pandangan subjektif
3. Pandangan jasa sebagai pandangan subjektif dari posisi objektif

---

<sup>1</sup> Buchari said, sari pati hukum acara pidana, FH. Unpas 2007, him 35

4. Pandangan Hakim sebagai pandangan objektif dari posisi objektif jadi hakim harus berada di atas semua pihak yang bersengketa berperkara hakim harus tidak memihak (*onparnjdig*) dan walaupun memihak haruslah memihak pada kebenaran dan keadilan, *justice is edn of the law*.

A.A.G. pweters mengemukakan pula bahwa :<sup>2</sup>

- a. apa yang mengikat / penuntut umum, pembela dan hakim adalah orientasi mereka secara bersma-sama, terhadap hukum.
- b. apa yang memisahkan mereka adalah penuntut umum bertindak untuk kepentingan umum, pembela bertindak demi kepentingan subjektif dari terdakwa, hakim dalam pertikaian ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit.

Hukum Acara Pidana termasuk hukum publik, karena mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara yang diselenggarakan untuk kepentingan umum, maka terdapat suatu perbedaan didalam sistem pembuktiannya dengan hukum acara perdata.

Di dalam hukum acara pidana dipergunakan sistem pembuktian negative (*negative wettelijk bewijstheorie*), halaman terlihat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 36

<sup>3</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional Yang Relevan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 2003, hlm 62-63

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Artinya tidak dapat seseorang dipidana, kecuali dengan minimal alat bukti (2 (dua) alat bukti) dan hakim akan kesalahan terdakwa. Bahwa keyakinan hakim disini adalah keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan benarlah terdakwa bersalah melakukannya

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang ini bermaksud bahwa :

- a. untuk memperlakukan terdakwa diperlukan suatu alat buktin minimal (dua (2) alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang dan;
- b. hakim yang akan kesalahan terdakwa.

Dengan perkataan lain biarpun alat bukti bertumpuk-tumpuk melebihi yang ditetapkan undang-undang, bilamana hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijsprank*)

Disamping itu dikenal pula sistem pembuktian :

- a. Positif.* Maknanya adalah bilamana alat-alat bukti telah terpenuhi menurut undang-undang, maka hakim harus menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Disini tidak ada keyakinan hakim.
- b. Conviction in time.* Maknanya adalah bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada seseorang berdasarkan keyakinan secara semata-mata.
- c. conviction in raissonne.* Maknanya disamping hakim terikat dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim dapat pula mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditetapkan undang-undang.

Bahwa pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut macam-macam alat bukti, yakni :

1. Keterangan saksi (Pasal 185 KUHP); seorang saksi memberikan kesaksian tentang is lihat, dengar dan alami;
2. Keterangan ahli (Pasal 186 KUHP); memberikan kesaksian sesuai bidang keahliannya;
3. Surat dakwaan (Pasal 187 KUHP);
4. Petunjuk (Pasal 188 KUHP);
5. Keterangan terdakwa (Pasal 189 KUHP);

Dari jajaran alat-alat bukti tersebut terlihatlah, bahwa keterangan saksi ditempa tkan pada urutan nomor (1) satu dari macam- macam alat bukti, hal ini dapat dipahami, karena keterangan saksilah yang dapat di uji kebenaran atau ketidakbenarannya dalam memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana, apakah benar saksi tersebut melihat, mendengar, mengalami, kesemuanya ini dapat diuji kebenaran didalam persidangan yang dilakukan secara langsung dan lisan (oral) yang tujuannya mencari kebenaran sejati (hakiki) sebagai salah satu tujuan hukum acara pidana (*matriale waarheid*).

Kejahatan apapun itu namanya haruslah pelakunya dimintakan pertanggungjawaban dimuka hukum. Siapapun ia, apapun pangkatnya dan jabatannya apabila ia melakukan suatu kejahatan hams diajukan ke meja hijau (hakim) untuk dimintakan pertanggungjawaban (mampu bertanggungjawab secara hukum). Dalam hal ini berlaku asas kesamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*).

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh anggota masyarakat, tetapi terdapat dan terjadi dalam masyarakat . Tetaplah apakah yang dikatakan cerdas pandai *ibi societas, ibi crimen* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) dan dimana ada kejahatan disitu ada hukum (*ibi ius*). Hukum bertujuan agar terwujudnya ketertiban, keteraturan, keharmonisan dalam pergaulan masyarakat, terwujudnya

keadilan dan ketertiban dalam hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Kejahatan pemerasan (*af persing*), suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, sebab hak tersebut sesuai diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :<sup>4</sup>

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta atas rasa aman dan perkindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

"setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".<sup>5</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hati nurani manusia terlepas apakah perbuatan tersebut tercantum atau tidak di dalam ketentuan hukum. Dengan perkataan lain suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan dalam undang-undang sudah merupakan kejahatan (*mala inse*) sedangkan

---

<sup>4</sup> Amandemen UUD 1945 Pembahasan I Sampai IV Dalam Suatu Naskah, Predi Pressindo, Yogyakarta, 2004, him 37

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 38

pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan apabila dicantumkan dalam undang-undang (*mala in prolabu ta*).

Pemerasaan, *afpersing*, *black mail* merupakan suatu kejahatan, suatu tindak pidana.

1. Ada beberapa definisi mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana :

- a. Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah : "suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana."<sup>6</sup>
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah : "sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggara tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertaruhkan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan."<sup>7</sup>
- c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan:
  1. Oleh hukum acara diancam dengan pidana
  2. Bertentangan dengan hukum

---

<sup>6</sup> E. Utrecht, him 253

<sup>7</sup> E. Utrecht, him 257

3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah

4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya

*d.* Moeljanto mengatakan tindak pidana adalah: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."<sup>8</sup>

*e.* R. Tresna mengatkan tindak pidana adalah: "suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum".<sup>9</sup>

2. Kesimpuiannya unsur-unsur tindak pidana itu adalah

*a.* Adanya perbuatan manusia;

*b.* perbuatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang dicantumkan dalam undang-undang;

*c.* Perbuatan tersebut melawan hukum;

*d.* Adanya kesalahan (schuld);

*e.* Adanya pidana.

---

<sup>8</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbitan Rineka Clpta. 2000, hlm.54.

<sup>9</sup> R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung, 1959, hlm 27



Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menyebutkan :<sup>10</sup>

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk sebagaimana adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."

Ayat (2) menyebutkan :

"Ketentuan Pasal 365 ayat (2, 3, dan 4) berlaku bagi kejahatan ini."

Adapun unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah

:

- a. Barangsiapa, menunjukkan pelaku;
  - b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Di sini ada unsur dolus (sengaja) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - c. Melawan hukum, artinya tanpa hak, tanpa kekuasaan, tanpa kewenangan;
  - d. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Jadi mempergunakan tenaga sedemikian rupa secara tidak sah,

---

<sup>10</sup> Andi Triandi, Delik-Delik Tertentu Special Delicten Di dala KUHP, Sinar Grafika, 2008, hlm. 82.

sehingga seseorang menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan hutang atau mengadakan piutang;

e. Adanya ancaman pidana.

Bilamana salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana pemerasan.

Di media cetak dan elektronik sering diberitakan kejahatan pemerasan ini, berbagai faktor memicu terjadinya kejahatan pemerasan ini. Faktor tersebut antara lain faktor ekonomi yang menghimpit, lapangan kerja yang sangat minim, pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang tidak ada (minim).

Dedi Setiyadi bin. Atun Tedi, pekerjaan buruh berumur 39 tahun, karena tidak mempunyai pekerjaan telah melakukan kejahatan pemerasan terhadap saudara Mochammad Saputra dan Gilang Ramadhan (korban). Saudara Dedi Setiyadi menghampiri saudara Mochammad Saputra dan Gilang Ramadhan sewaktu kedua korban tersebut berada di Jalan Kepatihan Bandung, sedang beristirahat di depan MC. Donald. Dedi Setiyadi langsung menawarkan ganja dan obat-obatan narkotika. Para korban menolak dengan alasan tidak ada uang walaupun hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos dan jajan, akan tetapi terdakwa tidak percaya langsung mengancam para korban. Dan mengatakan ia jawara dan langsung memukul korban Mochammad

Saputra dua kali pada bagian muka/hidung. Setelah itu menyuruh korban mengeluarkan isi dompetnya, lalu Dedi Setiyadi mengambil uang yang berada di dompet korban sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Kemudian Dedi Setiyadi membawa Gilang Ramadhan untuk mengambil obat-obatan, karena curiga Gilang Ramadhan menitipkan Hp miliknya ke Mochammad Saputra. Tidak berapa lama Dedio Setiyadi dan Gilang Ramadhan kembali ke tempat Mochammad Saputra berada yang maksudnya mengambil hp Gilang Ramadhan yang dititipkan pada Mochammad Saputra. Sesampainya di MC. Domald dimana Mochammad Saputra, sudah berada bersama-sama dengan petugas keamanan dan langsung membawa Dedi Setiyadi ke Pos Keamanan Kings Shopping Center dan diserahkan ke pihak Polrestabes Bandung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul : "STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 250/PID/B/2013 PN BANDUNG TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 368 AYAT (1) KUHPIDANA DI DALAM PRAKTEK PENGADILAN NEGERI BANDUNG".